

POLITISASI KORPRI PADA PEMILU ORDE BARU TAHUN 1970 – 1998 DI JAWA TIMUR

NABILLAH MAHDIANA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: nabillahmahdiana@mhs.unesa.ac.id

Wisnu

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Politisasi KORPRI adalah suatu keadaan dilibatkannya KORPRI dalam proses pemenangan peserta pemilu dalam suasana struktur dan kultur politik yang belum demokratis, otoritarian dan diskriminatif, yang dilakukan oleh pemerintah rezim orde baru untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Politisasi KORPRI pada pemilu orde baru tahun 1970 – 1998 didukung dengan kebijakan PP No. 6 Tahun 1970 tentang monoloyalitas pegawai negeri. Kebijakan monoloyalitas mewajibkan pegawai negeri untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar. Politisasi KORPRI pada pemilu orde baru dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara kooptasi dan mobilisasi pegawai negeri. Kooptasi dan mobilisasi dilakukan untuk mendapatkan massa yang mendukung Golkar sehingga Golkar memenangkan pemilu orde baru dan mampu melanggengkan kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan seperangkat prosedur, alat atau piranti yang digunakan sejarawan dalam tugas meneliti dan menyusun sejarah. Ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis praktik politisasi KORPRI pada pemilu orde baru tahun 1970 - 1998 di Jawa Timur.

Kata Kunci: Politisasi, KORPRI, Pemilu Orde baru, Jawa Timur

Abstract

The politicization of KORPRI is a condition of the involvement of KORPRI in the process of winning election participants in an atmosphere of political structure and culture that has not been democratic, authoritarian and discriminatory, carried out by the government of the New Order regime to maintain and expand its power. The politicization of KORPRI in the election of the new order 1970 - 1998 was supported by the law of government rules (PP) No. 6 Year 1970 about monoloyalty of civil servants. Monoloyalty policy requires civil servants to channel their political aspirations to Golkar. The politicization of KORPRI in the new order elections was carried out in several ways, namely by co-opting and mobilizing civil servants. Co-opting and mobilization carried out to obtain mass support for Golkar, so that, Golkar wons the election of new order and able to perpetuate its power. This study was used historical methods. The historical method is a set of procedures, tools that used by historians in the task of researching and compiling history. There are four steps that must be done: heuristic, criticism, interpretation and, historiography. The objectives of this study were (1) Analyze the practice of politicization of KORPRI in the New Order elections of 1970 - 1998 in East Java.

Keywords: Politicization, Indonesian Civil Servants Corps (KORPRI), New Order, East Java

PENDAHULUAN

Tulisan Ignas Kleden di Harian Kompas, 10 April 2012, yang berjudul “Demokrasi dan Partai Politik” menarik untuk dibahas, terutama terkait dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pada masa orde baru telah muncul gejala delegitimasi kekuasaan yang otoriter.¹ Delegitimasi kekuasaan masa orde baru ditandai oleh dominasi kekuatan organisasi sosial politik. Dominasi kekuatan organisasi politik yang kuat dipengaruhi oleh peran presiden sebagai pemegang

kekuasaan eksekutif pada pemerintahan Indonesia. Peran presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif membuat presiden dengan mudah membatasi partai politik menjadi 3 golongan yaitu partai nasional, spiritual dan karya.

Dalam konteks politik Indonesia pemerintahan orde baru menganut *bureaucratic polity*. Karl D. Jackson menjelaskan bahwa *bureaucratic polity* merupakan keterlibatan birokrasi dalam bidang politik.² Sedangkan Harold Crouch melihat bahwa keterlibatan birokrasi pada politik memiliki tiga ciri utama. *Pertama*, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi.³ Birokrasi menjadi

¹ Harian Kompas, 10 April 2012 yang berjudul “Demokrasi dan Partai Politik”

² Syafulan Rozi, 2006. “Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak: Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia”. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm. 19

³ *Ibid.*, hlm. 21.

lembaga politik yang dominan karena birokrasi menjalankan tugas yang penting bagi negara yakni sebagai pemerintahan umum (regulative function), pembangunan (adaptive function) dan fungsi pelayanan pada masyarakat (service function).⁴ Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuasaan birokrasi. Ketiga, massa di luar birokrasi secara politik adalah pasif, yang sebagian merupakan kelemahan partai-partai politik.

Kepolitikan pemerintahan orde baru juga ditandai oleh adanya gejala kearah krisis partisipasi (kooptasi dan mobilisasi politik) yang antara lain diterapkan lewat tangan-tangan birokratisasi. Kooptasi ini juga menunjukkan ada kecenderungan terjadi proses mobilisasi politik. Mobilisasi politik yang berlangsung dalam pemerintahan melibatkan organisasi KORPRI yang terdiri dari pegawai departemen, dan pemerintahan daerah agar memberikan monoloyalitas mendukung Golkar. Selain itu berlangsung juga kooptasi dan mobilisasi terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Dharmawanita, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Karang Taruna, Ulama, Guru, Organisasi Siswa Intra Sekolah dan lain-lain untuk menjadi anggota Golkar.⁵

KORPRI (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia) merupakan suatu organisasi yang didirikan pada awal masa orde baru untuk menjadi wadah bagi seluruh pegawai negeri di Indonesia. KORPRI memiliki fungsi yang penting dalam negara. KORPRI merupakan bagian dari birokrasi negara, instrumen negara, pelaksana kebijakan publik, dan abdi negara yang siap melayani seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada masa orde baru peran dan fungsi KORPRI disalah gunakan oleh pemerintah. Pada masa orde baru, KORPRI dijadikan mesin politik pada proses pemilihan umum. KORPRI di jadikan bagian dari salah satu jalur di dalam Golkar.⁶ KORPRI merupakan jalur B (Birokrasi) yang berguna untuk memperkuat dukungan pegawai negeri dalam setiap pemilihan umum. Pegawai negeri diharuskan untuk hanya menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar dengan memberlakukan monoloyalitas.

KORPRI juga berperan mendorong PNS untuk memilih Golkar, menggalang ibu-ibu Dharma Wanita lewat acara Santiaji untuk latihan menusuk kartu suara Golkar, setiap PNS memperoleh kartu keanggotaan Golkar, pada hari pemilihan pemberian suara dilakukan pada hari kerja di PTS terdekat dengan kantor. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa KORPRI yang terdiri atas pegawai negeri (PNS) menjadi kekuatan politik untuk mempertahankan status quo, pemerintah. Pemerintah menggunakan Golongan Karya (Golkar) sebagai penopangnya dan hal ini mengindikasikan adanya praktik politisasi KORPRI.

Politisasi KORPRI yang terjadi awal orde baru, pada tahun 1970 di dukung oleh kebijakan peraturan monoloyalitas pegawai negeri kepada Golkar. Peraturan monoloyalitas pegawai negeri kepada Golkar telah menghilangkan hak politik serta kesadaran politik kritis bagi pegawai negeri. Dampaknya di kalangan pegawai negeri akan tumbuh kesetiaan yang sifatnya irrasional. Sebagian pegawai negeri merasa tidak perlu untuk memiliki pilihan politik lain kecuali hanya Golkar yang menjadi garis politik bagi mereka. Politisasi KORPRI telah mengakibatkan berlangsungnya pembusukan politik, terjadinya kooptasi, mobilisasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang parah di berbagai sektor kehidupan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis politisasi KORPRI pada pemilu orde baru tahun 1970 – 1998 di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan seperangkat prosedur, alat atau piranti yang digunakan (sejarawan) dalam tugas meneliti dan menyusun sejarah.⁷ Ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Pada tahap heuristik, hal pertama yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah mencari sumber sebanyak – banyaknya baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu masa orde baru di Jawa Timur. Proses pencarian dan pengumpulan data didapatkan dengan melacak sumber – sumber di berbagai tempat. Sumber – sumber di peroleh penelitian dari Badan Kearsipan Jawa Timur, Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya.

Sumber primer yang di diperoleh oleh peneliti berupa dokumen Lembar Negara, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah yang di dapatkan dari Badan Kearsipan Jawa Timur, Beberapa dokumen yang di dapatkan peneliti mengenai politisasi KORPRI pada pemilu orde baru di Jawa Timur antara lain : (1) UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepegawaian, (2) UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. (3) Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 1971 tentang KORPRI. (4) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Selain lembaran negara tersebut peneliti juga menggunakan surat kabar sebagai data sumber primer. Surat kabar sejaman di peroleh dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Surat kabar sejaman akan memberikan informasi terkait dengan obyek yang dikaji yakni mengenai peristiwa mobilisasi pegawai negeri menjelang pemilu orde baru di Jawa Timur. Peneliti mengambil

⁴ Lihat Yahya Muhaimin, "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia". Prisma No.10, Oktober 1980, hlm.21.

⁵ OpCit Syafuan Rozi., hlm. 8.

⁷ Aminuddin Kasdi . 2010 . "Memahami Sejarah", Surabaya: UNESA University Press. hal. 10

sumber dari beberapa surat kabar antara lain : (1) Suara Karya, (2) Jawa Pos, (3) Kompas. Peneliti juga menggunakan majalah sejaman sebagai sumber primer antara lain : (1) Majalah Topik , (2) Majalah Tempo.

Sumber Sekunder yang digunakan peneliti berupa buku - buku penunjang yang berkaitan dengan sejarah politik serta jurnal dan makalah yang menjadi referensi dalam membantu menganalisis penelitian. Sumber sekunder di dapatkan penulis dari Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, dan Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya.

Kritik, proses melakukan pengujian terhadap kredibilitas dan otentisitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua. Pertama kritik ekstern yang dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang telah didapat, diuji dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat dipastikan keotentisitasannya. Kedua, kritik intern untuk mengetahui kredibilitas atau kebenaran isi sumber tersebut.

Interpretasi merupakan tahap ke tiga. Pada tahap ini fakta-fakta sejarah ditafsirkan dan dianalisis serta dihubungkan dalam rangkaian kronologis, sehingga didapatkan alur yang sistematis.

Historiografi ialah tahap terakhir. Dalam tahapan ini fakta yang terkumpul kemudian disintesis dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang deskriptif analitis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami pembaca. Hasilnya ialah tulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum yang di selenggarakan di Jawa Timur masa orde baru menarik untuk dikaji. Hal itu dikarenakan Jawa Timur merupakan daerah barometer nasional yang perolehan suaranya akan mempengaruhi perolehan suara tingkat nasional. Perolehan suara pada setiap pemilu orde baru di Jawa Timur mayoritas dimenangkan oleh Golkar. Kemenangan Golkar pada setiap pemilu orde baru di Jawa Timur di dapat Golkar melalui politisasi pada pegawai negeri KORPRI. Politisasi KORPRI adalah suatu keadaan dilibatkannya KORPRI dalam proses pemenangan peserta pemilu dalam suasana struktur dan kultur politik yang belum demokratis, otoritarian dan diskriminatif, yang dilakukan oleh pemerintah rezim orde baru untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.⁸ Dalam hal ini pemerintahan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur, mengontrol masyarakat dan pemerintahan pada semua bidang seperti bidang sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara.

A. Politisasi KORPRI Pada Pemilihan Umum Tahun 1971 Di Jawa Timur

Pemilihan umum 1971 merupakan pemilihan umum pertama pada masa orde baru. Pemilu 1971 di laksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 dengan payung hukum Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang pemilu. Pemilihan umum 1971 di ikuti oleh 10 peserta pemilu.

Pada pemilihan umum 5 Juli 1971, Sekber Golkar tampil menjadi salah satu kontestan pemilu yang bercorak non partai politik. Meskipun Sekber Golkar bukan partai politik namun Sekber Golkar mampu bersaing dengan baik dalam pemilu. Perolehan suara Sekber Golkar dalam pemilu juga tergolong tinggi. Sekber Golkar mendapatkan suara terbanyak di Jawa Timur pada pemilu 1971. Berikut ini tabel hasil pemilihan umum 3 Juli 1971 :

Tabel
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum 1971

No	Daerah Tingkat I	PERTI	PSII	NU	PARMUSI	GOLKAR	PARKINDO	MURBA	PARTAI KATHOLIK	PNI	IPKI
1	DI. Aceh	127.58.00	74.787	80.965	182.458	483.085	9630	330	775	3.834	3.090
2	Riau	10.503	69.837	136.483	187.033	1.786.028	111.988	4.208	44.067	166.135	31.272
3	Sumba	53.536	23.114	35.869	273.104	761.165	7.708	3.821	5.002	5.046	6.492
4	Riau	18.575	9.403	48.184	61.963	515.505	4.540	288	2.908	6.747	1.730
5	Sumsel	10.195	91.889	153.440	169.544	685.732	6.648	1.753	14.053	70.274	10.913
6	Jambi	1.611	4.485	22.077	20.004	408.351	682	160	467	3.043	2.040
7	Bengkulu	5.282	3.600	5.607	19.830	154.805	525	77	469	1.084	2.047
8	Lampung	2.040	47.478	137.800	75.704	869.894	5.422	680	10.933	50.628	2.344
9	Jabar	55.315	304.989	1.310.679	809.700	7.525.797	40.670	10.042	28.013	272.551	69.918
10	Jakarta	11.456	56.381	452.803	150.735	912.400	58.130	5.977	56.370	227.535	138.21.00
11	Jateng	12.937	90.468	2382.462	468.704	5.174.182	55.447	7.084	52.745	2.003.177	86.053
12	DIY	4.385	30.832	126.315	108.184	736.493	13.190	1.533	35.439	119.431	6.561
13	Jatim	14.757	154.707	4.387.507	339.919	8.843.077	38.047	3.900	30.47.00	22.748	31.691
14	Kalbar	1.073	7.322	89.355	57.621	532.836	5.716	441	54.275	24.385	30.358
15	Kalteng	98	4.052	39.802	10.415	200.561	3.547	82	403	1.195	1.942
16	Kalsel	944	6.381	210.941	52.122	516.402	1.940	743	508	3450	2.710
17	Kaltim	653	11.320	68040	19.044	150.146	18.146	3.113	9.225	17.600	1.503
18	Sulut	-	96.820	38.575	42.053	472.974	52.238	713	16.343	44.846	13.172
19	Sulteng	231	48.188	18.505	13.563	326.379	10.927	83	624	5.156	1.111
20	Sulawesi	207	4.383	0.3555556	7.287	316.047	424	10	1.187	932	3.813
21	Sulawesi	8.755	106.730	230.127	126.905	1.970.501	35.084	440	9.181	6.613	20.361
22	Bali	500	1.181	16.725	5.436	569.404	3.272	748	2.106	130.203	20.254
23	NTB	5.370	52.308	150.110	53.357	736.801	2.465	663	961	47.381	5.558
24	NTT	2.650	11.935	14.413	6.961	706.557	154.532	171	210.312	35.554	5.930
25	Maluku	2321	15.414	33.653	75.694	213.402	98.379	2.006	16.367	21.914	1.507
	Jumlah	381.31.00	1.308.237	10.213.650	2.930.760	34.348.673	733.359	48.175	603.740	8.793.266	338.04.00
	Persentase (%)	0,70%	2,30%	18,67%	5,36%	62,80%	1,34%	0,09%	1,10%	6,94%	0,62%
	Kursi	2	10	58	24	237	7	-	3	20	-

Sumber : Kompas, 9 Agustus 1971

Sekber Golkar menang mutlak dalam pemilu 1971. Sekber Golkar mendapat perolehan suara terbanyak Di Jawa Timur. Kemenangan Sekber Golkar dalam pemilu 1971 di Jawa Timur diluar perkiraan partai lainnya seperti NU dan Parmusi yang tergolong sebagai partai yang cukup berpengaruh di Jawa Timur. Sebagian besar suara NU dihasilkan dari daerah pemilihan di Jawa, khususnya Jawa Timur. Partai NU mendapatkan suara kedua terbanyak setelah Golkar karena NU banyak mendapatkan dukungan dari komunitas keagamaan dan para Ulama. Sedangkan Sekber Golkar mendapatkan dukungan dari kebijakan monoloyalitas pegawai negeri. Dalam pemilu 1971 kehadiran Sekber Golkar dalam pemilu membuat perolehan suara PNI menurun karena pegawai - pegawai negeri yang sebelumnya memberikan suaranya untuk PNI, mengalihkan suaranya untuk Sekber Golkar pada pemilu

⁸ Syafuan Rozi, Opcit hal 28-29.

1971. PNI dalam pemilu 1955 mampu memperoleh suara banyak karena PNI di anggap menjadi partai pegawai negeri.

Kemenangan Golkar dalam pemilihan umum 1971 telah disiapkan oleh pemerintah orde baru sebagai saluran pembangunan legitimasi politik pemerintahan kepada Sekber Golkar. Menjelang pemilihan umum 1971 Pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui fusi. Penyederhanaan partai politik pada dasarnya adalah kontinuitas dari apa yang pernah dirintis oleh Soekarno. Sejak tahun 1961 telah beberapa kali dilaksanakan usaha untuk mengurangi jumlah partai politik. Menjelang pemilihan umum tahun 1971 jumlah partai politik di kurangi lagi menjadi 9 buah. Pada bulan Maret 1970, Soeharto melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik, dan menyepakati adanya 2 kelompok koalisi didalam DPR, antara lain; Kelompok pertama yaitu Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katholik. Kemudian Kelompok kedua yaitu Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

Melalui Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 12 tanggal 4 Desember 1969, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang anggota badan – badan perwakilan daerah yang berasal dari golongan fungsional untuk memegang keanggotaan salah satu partai politik. Selanjutnya peraturan yang berlaku setelah pemilihan umum tersebut, mengatur bahwa diantara wakil partai dengan golongan fungsional hendaknya seimbang jumlahnya didalam badan – badan perwakilan. Dan semua anggota badan perwakilan yang ditunjuk mestilah ditentukan oleh Sekber Golkar. Dengan demikian Sekber Golkar juga memperoleh dukungan dari kelompok – kelompok fungsional yang semula memberikan suaranya kepada partai politik.⁹

Pada tahun 1970 pemerintah orde baru membuat kebijakan PP No. 6 Tahun 1970 tentang monoloyalitas pegawai negeri atau KORPRI kepada Sekber Golkar. Kebijakan monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan orde baru yang mewajibkan pegawai negeri untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada Sekber Golkar. Kebijakan Monoloyalitas diterapkan oleh pemerintahan orde baru pada semua pegawai negeri sipil yang tergabung dalam KORPRI untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum orde baru. Kebijakan monoloyalitas merubah fungsi PNS yang harusnya sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa.

Pada pemilihan umum 1971, KORPRI juga berperan mendorong PNS untuk memilih Golkar, menggalang ibu-ibu Dharma Wanita lewat acara Santiaji untuk latihan menuskus kartu suara Golkar. Setiap PNS memperoleh kartu keanggotaan Golkar, dan pada hari pemilihan pemberian suara dilakukan pada hari kerja di PTS terdekat dengan kantor.¹⁰ KORPRI yang terdiri atas pegawai negeri (PNS) menjadi kekuatan politik untuk mempertahankan “*status quo*” pemerintah, dan

pemerintah menggunakan Sekber Golkar sebagai penopangnya. KORPRI yang bermoloyalitas terhadap Golkar akan menunjukkan suatu gejala yang tidak netral. KORPRI akan dilibatkan pemerintah secara langsung dan terang-terangan untuk menjadi pendukung dan anggota (kader) organisasi peserta pemilu (Sekber Golkar) guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik diparlemen dan eksekutif.¹¹

Upaya lain yang ditempuh Sekber Golkar untuk menarik simpati masyarakat untuk memperoleh dukungan yaitu dengan membentuk berbagai organisasi massa yang didasarkan kepada fungsi kehidupan di dalam masyarakat. Golkar membentuk berbagai pengelompokan organisasi antara lain ; wanita, petani, buruh, pegawai negeri, mahasiswa dan sebagainya dibawah naungan Golkar. Berdasarkan banyaknya massa yang mendukung Golkar yaitu adanya keterlibatan pegawai negeri dalam pemilihan umum, maka Golkar berusaha untuk memperbanyak jumlah pegawai negeri. Berikut ini tabel pertumbuhan pegawai negeri masa orde baru :

Tabel
Pertumbuhan Pegawai Negeri Tahun 1950-2008

No	Pegawai Negeri (Juta)	Source
1950	1990	Rohdewold 1995
1960	0,4	Rohdewold 1995
1970	0,5	Rohdewold 1995
1980	2	Rohdewold 1995
1985	3	World Bank 1993
1988	3,5	World Bank 1993
1990	3,8	World Bank 1993
1992	3,9	World Bank 1993
1993	4	Rohdewold 1995
1998	4	World Bank 1998
2008	4,1	BKN

Sumber : Rohdewold (1995), Bank Dunia (1998), BKN (2008) dalam buku Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan yang di terbitkan oleh PT. Gramedia Pusataka Utama.

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah orde baru melakukan pembesaran terhadap jumlah anggota pegawai negeri secara kuantitatif. Ditahun 1970 anggota pegawai negeri hanya sekitar 515 ribu jiwa, maka 10 tahun kemudian jumlah itu telah meningkat menjadi 4 kali lipat dan 20 tahun kemudian membengkak menjadi sekitar 6 kali lipat. Jumlah anggota birokrasi di Indonesia dari 393.000 orang berkembang menjadi 2.047.000 orang. Pemerintah orde baru melakukan pembesaran terhadap jumlah anggota pegawai negeri secara kuantitatif sebagai upaya untuk menggalang massa dari pegawai negeri yang selama ini menjadi pendukung utama dan kekuatan Golkar selama pemilihan umum. Pembesaran jumlah pegawai negeri telah menyebabkan lebihnya pegawai yang ada di pemerintah pusat maupun

⁹ *Ibid.*, Arbi Sabit, hal 70.

¹⁰ *Op.Cit.*, hal. 40.

¹¹ Syafuan Rozi, *Opcit* hal. 49

daerah. Akibatnya maka, banyak pegawai negeri yang tidak produktif dan kompeten.

B. Politisasi KORPRI Pada Pemilihan Umum Tahun 1977 Di Jawa Timur

Pemilihan umum 1977 merupakan pemilihan umum kedua dalam masa orde baru yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977, dengan payung hukum Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu yang telah diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Pada tahun 1973, telah beberapa kali dilaksanakan usaha pembatasan jumlah partai politik melalui fusi. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hasil sidang MPR tahun 1973, menyatakan bahwa pemilu 1977 hanya di ikuti oleh tiga peserta yaitu dua Partai Politik dan satu Golongan Karya. Kebijakan penyederhanaan melalui fusi partai politik dikuatkan dengan Undang – Undang tentang Partai Politik dan Golkar yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada 6 Desember 1974. Rancangan tersebut pada 14 Agustus 1975 disetujui oleh semua fraksi DPR dan pada 15 Agustus 1975 disahkan oleh Presiden menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.¹²

Menjelang pemilihan umum 1977, terdapat isu penting yang mengemuka, yaitu berkaitan dengan penentuan tanda gambar partai politik dan Golkar. Partai Demokrasi Indonesia diharuskan mengubah rancangannya sedangkan Partai Persatuan Pembangunan dilarang untuk memakai tanda gambar Ka'bah. Pemerintah dan Mendagri Amirmachmud saat itu sangat ingin mengganti tanda gambar Ka'bah untuk menghilangkan identitas islam pada Partai Persatuan Pembangunan. Namun pihak Partai Persatuan Pembangunan mempertahankan dan mengancam akan mengundurkan diri dari pemilu 1977. Hal tersebut dilakukan pemerintah dan Mendagri karena Identitas keagamaan yang dipakai Partai Persatuan Pembangunan dianggap berpotensi menjadi kekuatan yang dapat menyaingi Golkar. Partai Persatuan Pembangunan menjadikan islam sebagai identitas partai sehingga Partai Persatuan Pembangunan menjadi satu – satunya partai wadah bagi umat islam.

Pemerintah orde baru melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang juga mengatur Massa Mengambang (*Floating Mass*). Kebijakan ini membatasi gerak-gerik partai- partai politik non Golkar sampai Dati II, yaitu tingkat Kabupaten dan Kota. Sementara Golkar yang di identifikasi oleh orde baru sebagai orsospol yang non partai politik terbebas dari kebijakan ini. Golkar dengan bebas bekerjasama dengan pihak kelurahan, ketua RT/RW, petugas Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk kepentingan mencari dukungan untuk Golkar.¹³

Kebijakan *floating mass* telah merugikan partai politik yang lainnya karena kebijakan ini telah memutuskan hubungan antara elite partai politik dengan

massa pedesaan. Pemutusan hubungan antara elite partai politik dengan massa pedesaan menimbulkan kaderisasi politik yang dilakukan pada tingkat bawah oleh partai politik tidak bisa dilakukan sehingga partai politik kesulitan untuk mencari dan merekrut aktifis aktifis yang loyal dan cakap. Hal ini menyebabkan partai politik tidak memiliki pendukung pada tingkat bawah, khususnya wilayah pedesaan. Sedangkan Golkar sebagai non partai politik merasa diuntungkan karena tidak terikat dengan kebijakan tersebut. Golkar dengan mudah mendapatkan dukungan dari tingkat bawah, di daerah pedesaan karena aparat pemerintah desa dan kecamatan yang merupakan pegawai negeri dan aktifis – aktifis dari Golkar.

Kebijakan *floating mass* ini juga menyebabkan naiknya perolehan suara Golkar dalam pemilu 1977. Golkar mendapatkan suara terbanyak dan unggul di Jawa Timur Berikut ini perolehan suara pemilihan umum tahun 1977 di Indonesia.

Tabel
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 1977

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara Yang Diperoleh Tiap Organisasi				Jumlah Kursi Yang Diperoleh Tiap Organisasi		
		PPP	Golkar	PDI	Jumlah	PPP	Golkar	PDI
1	D.I Aceh	641.256	460.992	17.390	1.119.638	6	4	-
2	Sumut	706.289	2.112.590	359.937	3.178.776	4	12	2
3	Sumbar	460.024	942.752	14.825	1.417.601	5	9	-
4	Riau	270.374	504.724	21.922	797.020	2	4	-
5	Sumsel	713.310	833.804	126.437	1.673.551	4	5	1
6	Jambi	93.797	300.091	5.062	398.950	1	5	-
7	Bengkulu	59.676	208.684	4.627	272.987	1	3	-
8	Lampung	525.527	1.053.525	125.755	1.704.807	2	5	1
9	Jabar	3.413.310	7.825.728	620.462	11.959.500	14	33	3
10	Jakarta	1.033.069	980.452	430.905	2.444.426	5	5	2
11	Jateng	3.082.757	5.735.376	2.080.580	10.898.716	15	27	10
12	D.I.Y	304.510	741.611	264.671	1.310.792	1	4	1
13	Jatim	5.230.707	8.538.502	741.276	14.510.485	21	35	3
14	Kalbar	218.474	689.376	93.028	1.000.878	1	5	1
15	Kalteng	106.361	2.78.916	13.999	399.272	2	4	-
16	Kalsel	417.590	419.095	8.534	845.239	5	5	-
17	Kaltim	162.621	261.520	34.958	459.099	2	3	1
18	Sulut	165.026	682.484	88.937	936.447	1	4	1
19	Sulteng	102.552	421.749	7.481	531.782	1	3	-
20	Sulawesi	12.791	398.521	3.161	409.473	-	4	-
21	Sulsel	391.420	2.379.834	22.484	2.793.738	3	20	-
22	Bali	19.318	1.002.143	152.475	1.173.936	-	7	1
23	NTB	398.234	6.24.900	63.842	7.306.976	2	4	-
24	NTT	25.451	1.182.116	101.816	1.309.383	-	11	1
25	Maluku	115.694	436.910	53.403	605.007	1	3	-
26	Irian Jaya	21.353	436.742	44.770	502.865	-	8	1
	Jumlah	18.743.491	39.650.097	5.504.757	63.998.344	99	232	29

Sumber: Suara Karya, 9 Juni 1977

Golkar menang mutlak dalam pemilu 1977. Golkar menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1977 di Jawa Timur karena Golkar memiliki susunan organisasi yang terstruktur secara vertikal. Struktur organisasi Golkar vertikal kebawah antara lain terdiri dari 5 anggota Dewan Pembina Pusat Golkar dan pimpinan eks Kino (Kelompok Induk Organisasi) Golkar, Kosgoro, Soksi, MKGR, Gakari, dan Profesi.¹⁴ Selain itu, kekuatan Golkar dalam pemilihan umum 1977 terletak pada ABRI dan KORPRI. Golkar banyak didukung oleh keluarga ABRI, para pejabat pemerintah dan Golkar juga menggunakan aparat,

¹² Muchamad Ali Safa'at. 2011. "Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergaulan Republik". Jakarta : Rajawali Pers. hal. 213

¹³ Op.Cit., Syafuan Rozi. hal. 58

¹⁴ Op.Cit., Tempo, 21 Oktober 1978 hal. 5 yang berjudul "Janur Kelapa, Untuk Mawas Diri"

gedung pemerintah selama Pemilu 1977.¹⁵ Majalah Tempo 21 Oktober 1978 mengungkapkan kelemahan Golkar yang belum mandiri dan dianggap masih banyak bergantung pada ABRI dan KORPRI.

Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1977 ini didukung oleh sistem desentralisasi orde baru yang terpusat. Hal ini terlihat dari ucapan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan Ali Murtopo dalam Majalah Tempo 18 November 1972 mengemukakan bahwa: “Tatanan birokrasi dan pemilihan gubernur serta pejabat di daerah semua kebijakan ditentukan oleh pusat. Selain itu penerapan sentralisasi pengambilan keputusan dan alokasi anggaran tampak didominasi oleh pemerintahan pusat Jakarta. Kedua Instansi di pusat, Mendagri dan Aspri Presiden memiliki hak untuk menentukan jabatan gubernur dan pejabat di daerah.”¹⁶

Kebijakan birokrasi yang terpusat memudahkan pemerintah dalam mengontrol masyarakat secara mudah, kebijakan birokrasi terpusat juga membuat pemerintah lokal diatur secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ – organ supra – struktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa melihat keberagaman sistem politik lokal yang sudah lama terbentuk. Akibatnya terjadi sentralisasi kelembagaan kelompok kepentingan yang kemudian menjadi salah satu mesin politik untuk membangun dukungan masyarakat. Salah satu dampak dari penerapan kebijakan tersebut bagi pemerintah lokal yakni dapat menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi putra daerah. Kebijakan ini membuat putra daerah tidak akan memperoleh kesempatan untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri karena Mendagri dan Aspri Presiden yang berhak untuk menentukan jabatan gubernur dan pejabat di daerah.

Dalam pemilihan umum 1977 di Jawa Timur menunjukkan adanya gejala politisasi KORPRI yang ditandai dengan mobilisasi masyarakat secara vertikal, pengekangan kebebasan individu dan kelompok dalam kebijakan yang ditetapkan secara legal dan mendapat legitimasi oleh pusat. Politisasi KORPRI cenderung untuk memobilisasi masyarakat tanpa adanya partisipasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat sehingga dapat mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya. Selain mobilisasi, politisasi juga dilakukan melalui kooptasi dan intervensi terhadap orsospol yang lainnya sehingga hanya ada satu orsospol sebagai kekuatan tunggal yang berkuasa. Akibat politisasi tanpa adanya partisipasi masyarakat telah membatasi hak, dan kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat.

C. Politisasi KORPRI Pada Pemilihan Umum Tahun 1982 Di Jawa Timur

Pemilihan umum tahun 1982 merupakan pemilihan umum ketiga dalam masa orde baru yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilihan umum 1982 dilaksanakan dibawah payung hukum Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilu, yang diperbarui dengan undang-undang nomor 4 tahun 1975, Undang – Undang nomor 2 Tahun 1980. Pemilu ketiga pada tahun

1982 diikuti oleh tiga peserta kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya.

Pada pemilihan umum 1982, selalu di dengungkan propaganda dan desakan bagi dipilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1983 – 1988 dengan gelar bapak pembangunan. Sedangkan bagi PPP dan PDI haruslah menghadapi keadaan yang sulit. Kedua partai tersebut tidak diuntungkan dengan adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaan tentang pemilihan umum. Dalam hal yang berkaitan dengan pemilihan umum, PPP tidak mendapat back up dari kekuasaan seperti Golkar sehingga satu-satunya aset yang dapat di jual dalam kampanyenya. Komitmen PPP untuk memperjuangkan nasib kaum dhuafa serta menjaga dan membela aqidah islam guna mendapatkan kepercayaan rakyat.

Dalam pemilu 1982, Golkar kembali memperoleh kemenangan dengan suara terbanyak dan menguasai parlemen pemerintahan. Berikut ini tabel perolehan suara dalam pemilihan umum 1982:

Tabel
Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum 1982

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Pemilih	Jumlah Suara yang Diperoleh Tiap Organisasi			Perolehan Kursi		
			PPP	GOLKAR	PDI	PPP	GOLKAR	PDI
1	D.I. Aceh	1.411.491	785.610	479.921	53.463	6	4	-
2	Sumut	4.199.103	805.123	2.805.619	276.601	4	14	1
3	Sumbar	1.807.527	625.527	936.726	13.239	6	8	-
4	Riau	1.159.795	281.197	762.267	27.237	2	4	-
5	Sumsel	2.470.136	848.258	1.240.947	131.374	4	6	1
6	Jambi	786.328	105.388	643.282	10.906	1	5	-
7	Bengkulu	404.602	95.501	253.817	11.784	1	3	-
8	Lampung	2.417.391	685.232	1.260.245	237.630	2	5	1
9	Jabar	15.006.732	3.713.341	8.577.685	1.292.013	14	31	5
10	Jakarta	3.530.939	1.265.321	1.449.668	511.930	5	6	2
11	Jateng	14.416.784	3.637.112	7.925.921	1.547.878	14	31	6
12	Yogyakarta	1.636.180	333.338	865.621	231.970	1	4	1
13	Jatim	17.407.399	5.775.089	8.863.332	1.055.183	21	32	4
14	Kalbar	1.364.607	261.938	888.148	104.963	1	5	1
15	Kalteng	530.808	77.633	437.953	6.362	1	5	-
16	Kalsel	1.152.995	424.937	633.836	11.796	4	6	-
17	Kaltim	671.908	182.059	349.471	40.170	2	4	-
18	Sulut	1.158.815	76.671	970.107	69.696	1	5	-
19	Sultengah	686.812	105.254	537.629	21.523	1	3	-
20	Sulteng	491.397	12.867	482.716	2.408	-	4	-
21	Sulsel	3.241.289	317.850	2.757.155	18.289	2	21	-
22	Bali	1.441.769	26.464	1.202.343	131.883	-	7	1
23	NTB	1.455.662	371.415	906.171	42.300	2	4	-
24	NTT	1.498.722	18.985	1.408.774	35.192	-	12	-
25	Maluku	748.774	134.766	533.099	41.202	1	3	-
26	Irian Jaya	651.701	20.367	590.557	28.000	-	8	1
27	Timor Timur	306.507	666	308.046	1.022	-	4	-
28	P.P.L.N	77.466	(perhitungan untuk DKI Jakarta)			-	-	-
	Jumlah	82.132.293	20.985.876	48.071.451	5.956.037	96	244	24

Sumber : Suara Karya, 14 Mei 1982

Dalam pemilu yang berlangsung pada tanggal 4 Mei 1982 Golkar mendapat kemenangan besar di seluruh provinsi Indonesia kecuali Aceh. Golkar menang mutlak dalam pemilu 1982 dan menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1982 di Jawa Timur ini juga tidak terlepas adanya peranan dari Babilu. Babilu di Golkar menjadi unsur kategori *personal – attachment*. Peranan Babilu dalam kabinet dan portofolio menyebabkan kedudukan yang cukup kuat untuk memanipulasi sumber – sumber dukungan untuk Golkar sehingga Golkar mampu memenangkan setiap pemilu orde baru.

Menjelang pemilu 1982 pemerintah melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan efisiensi di tubuh

¹⁵ Topik, November 1981 hal. 13 yang berjudul “Penolakan P & K Dipertanyakan”

¹⁶ Ibid., Tempo, 18 November 1972 hal. 6 yang berjudul “Dua Kiblat”

Golkar. Pemerintah orde baru berusaha untuk menggabungkan kelompok Kino - Kino dalam satu komando ke dalam DPP Golkar, sedangkan pengorganisasian dan konsolidasi dilakukan melalui tiga jalur, yaitu Jalur A (ABRI), Jalur B (Birokrasi), dan Jalur G (Golkar).¹⁷ Golkar sebagai organisasi sosial politik tidak dapat berdiri sendiri. Eksistensi Golkar ditunjang oleh kekuasaan pemerintah dan menjadi kekuatan politik yang dominan. Pimpinan Golkar mulai dari pusat sampai ke daerah hanya sebagai pelaksananya dari apa yang telah digariskan oleh peminanya. Kekuatan Golkar terletak pada pegawai negeri, kaum birokrat dan ABRI.¹⁸ Pembina Golkar seluruhnya terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan eksekutif. Para peminanya sebagian besar terdiri dari para menteri kabinet.

Menjelang pemilu 1982 juga ditandai oleh melemahnya kekuatan partai politik. Lemahnya partai politik disebabkan konflik internal dalam perebutan kepemimpinan partai. Adanya konflik dan perbedaan kepentingan dalam berbagai kelompok partai politik kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah orde baru untuk memberikan intervensi. Intervensi yang diberikan oleh pemerintah membuat partai politik gagal dalam memainkan peran politiknya. Pemerintah mewajibkan agar segala aktivitas yang dilakukan oleh semua partai politik harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Hal itu membuat pemerintah dapat mengontrol dan mengawasi aktivitas partai politik.

Selain konflik internal pada partai politik PPP dan PDI, saat itu juga ada berbagai tekanan yang diberikan aparat keamanan kepada partai politik. Tekanan itu berupa banyaknya kader partai politik di beberapa daerah yang di takut - takut, di tahan, di intimidasi bahkan tidak diizinkan untuk menghadiri kampanye.¹⁹ Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan pemilu di Surabaya tak ada saksi partai politik. Hampir di seluruh TPS di Surabaya tidak ada saksi dari PPP dan PDI. Partai politik PPP dan PDI kesulitan menunjuk orang yang bersedia menjadi saksi di TPS.²⁰

Menjelang pemilu 1982 pemerintah berusaha untuk melakukan upaya politisasi dalam birokrasi (KORPRI). Lurah akan di pegawai negerikan dengan tujuan agar dapat lebih mudah diawasi. Hal ini terdapat dalam pemberitaan majalah Topik, Juni 1979 yang berjudul *Pencerminan Azas Demokrasi*. Pangkoptim Laksamana Sudomo mengemukakan sebuah gagasan yaitu lurah sebaiknya dipegawai negerikan saja, alasannya adalah supaya mereka dapat lebih mudah diawasi.²¹ Gagasan Sudomo di atas menjadi indikator bahwa terjadi politisasi dalam birokrasi (KORPRI). Lurah bagian dari birokrasi pemerintah yang jabatannya diangkat oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini lurah diangkat oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka lurah harus tetap diawasi kesetiannya pada pemerintah. Lurah sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga harus loyal dan mendukung pemerintah. Lurah yang menjadi

pegawai negeri akan melakukan mobilisasi massa pada masyarakat desa untuk memenangkan Golkar dalam pemilu 1982. Lurah tersebut menjadi tangan panjang pemerintahan. Lurah yang berhasil membantu memenangkan dan menyukseskan pemilu Golkar sehingga Golkar mendapat suara banyak di dati II maka lurah dan desa itu berhak menikmati fasilitas umum yang di bangun oleh pemerintah di desa seperti listrik masuk desa, pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan sanitasi lingkungan.

Mendagri Amir Machmud juga berpikiran yang sama untuk mempegawai negerikan lurah. Mempegawai negerikan lurah merupakan cara yang paling tepat agar lurah loyal terhadap pemerintah dan mendukung pemerintah. Lurah yang di pegawai negerikan maka lurah itu menjadi bagian dari birokrasi pemerintah yang terikat kepatuhannya pada kebijakan monoloyalitas pegawai negeri. Lurah sebagai pegawai negeri harus menyalurkan aspirasi politiknya pada Golkar. Lurah juga berkewajiban untuk memobilisasi massa dengan mengajak warga desa lainnya untuk mendukung Golkar pada pemilu 1982.

Menjelang pemilu 1982 juga terjadi diskriminasi oleh birokrasi orde baru berkaitan dengan tidak diberikannya izin atau dukungan instansi departemen terhadap anggota pegawai negeri yang akan dicalonkan menjadi calon partai politik lain yang tidak berafiliasi pada Golkar. Hal ini tercantum dalam Surat Kabar Topik, November 1981, yang berjudul "Penolakan P & K Dipertanyakan". Surat kabar tersebut memaparkan bahwa adanya penolakan ijin terhadap anggota pegawai negeri yang menjadi calon PDI di pemilu 1982. Pimpinan PDI, Achmad Subagyo, mengkonstatir bahwa penolakan itu merupakan kesengajaan dari pihak pimpinan Departemen P & K untuk merintangangi atau menghambat pegawai negeri yang dicalonkan oleh PDI. Dugaan tersebut juga semakin menguat setelah adanya laporan dari berbagai daerah yang mengatakan bahwa kebijaksanaan semacam itu tampaknya hanya tertuju kepada partai politik saja, tetapi tidak terjadi pada Golkar. Pegawai negeri dari P & K yang dicalonkan oleh Golkar tidaklah mengalami kesulitan apa-apa.

Kasus di atas menjadi indikator bahwa adanya tindakan diskriminatif oleh birokrasi orde baru berkaitan dengan tidak diberikannya izin atau dukungan instansi departemen terhadap anggota pegawai negeri yang akan dicalonkan menjadi calon partai politik lain yang tidak berafiliasi pada Golkar. Surat Izin ditolak dan tidak akan dikeluarkan oleh departemen P & K. Perilaku diskriminatif juga terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan pemilu 1982 yakni Golkar dapat menggunakan fasilitas pemerintah antara lain : aparat pemerintah, gedung, dll.

Menjelang pemilu 1982 juga terdapat peristiwa mobilisasi massa pada pegawai negeri. Hal tersebut diberitakan dalam Surat Kabar Suara Karya, Selasa 6 April 1982 yang berjudul "Para Pegawai Harus Berjiwa Pejuang". Surat Kabar Suara Karya memberitakan bahwa

¹⁷ Saksono, Bani. 1995. "Tiada Hari Tanpa Karya." Jakarta: Departemen Penbitmassmed DPP Golkar. hal. 120

¹⁸ Topik, Oktober 1981 yang berjudul "Harapan Para Cendekiawan"

¹⁹ OpCit., hal 175

²⁰ Jawa Pos, 5 Mei 1982 yang berjudul "Hampir Tak Ada Saksi Parpol"

²¹ Topik, Juni 1979. yang berjudul "Pencerminan Azas Demokrasi"

ketua dewan pembina KORPRI Dati I Jatim mendatangi acara apel besar pembangunan mengawali pelaksanaan tahun ke 4 pelita III di Jawa Timur. Acara tersebut bertempat di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari.

Dalam surat kabar tersebut, Ketua dewan pembina KORPRI tingkat I Jatim Soenandar Prijosoedarmo, menegaskan bahwa "KORPRI harus bertekad bulat untuk menyukseskan pemilihan umum tanggal 4 Mei mendatang dibawah pimpinan nasional orde baru. KORPRI, juga bertekad bulat untuk menyukseskan sidang Umum MPR tahun 1983 mendatang, baik dalam menyukseskan pertanggung jawaban Presiden, maupun ikut mendukung aspirasi rakyat yang menghendaki diangkatnya kembali pak Harto menjadi bapak pembangunan Nasional."²²

Dari pernyataan Soenandar di atas maka terlihat bahwa KORPRI Jawa Timur memberikan monoloyalitasnya kepada pemerintah dan siap untuk menyukseskan Golkar dalam pemilu 1982 di Jawa Timur serta mendukung pemerintah orde baru untuk melanggengkan kekuasaannya.

Gejala mobilisasi juga dapat dilihat dari pemberitaan dalam Surat Kabar Suara Karya, 14 April 1982 yang berjudul "Jangan Malu Dan Takut, Tunjukkan Identitas KORPRI Di Tengah – Tengah Masyarakat". Dalam surat kabar tersebut, Mendagri Amirmachmud selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI Pusat dengan tegas menyatakan bahwa: "Warga KORPRI yang jumlahnya 2 juta lebih harus memantapkan monoloyalitasnya pada pembangunan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Monoloyalitas itu wajib dilakukan agar warga KORPRI tidak pecah belah, tetapi tetap utuh, kokoh dan bersatu. Mendagri Amirmachmud juga menegaskan kembali kepada seluruh jajaran KORPRI termasuk keluarganya bahwa, tidak wajib hukumnya untuk menusuk gambar Ka'bah. Warga KORPRI harus menunjukkan diri atau identitasnya secara tegas di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu warga KORPRI jangan malu-malu memakai baju KORPRI. Seandainya ada yang malu-malu atau ragu-ragu, lebih baik keluar saja dari KORPRI."²³

Pemberitaan di atas mengindikasikan bahwa KORPRI berperan sebagai mesin politik pemerintah orde baru. KORPRI harus mendukung kebijakan pemerintah dan memberikan monoloyalitasnya kepada pemerintah. Pemerintah melakukan mobilisasi agar KORPRI beserta seluruh keluarganya menusuk Golkar dalam pemilu dan pemerintah berusaha menjauhkan dari pengaruh partai politik lain dengan pernyataannya yang tidak wajib untuk menusuk lambang Ka'bah PPP.

Mendagri Amirmachmud selaku ketua Dewan Pembina KORPRI Pusat menginstruksikan agar KORPRI diseluruh Indonesia menusuk tanda gambar Golkar pada tanggal dilangsungkannya pemilu 1982. Hal tersebut terdapat dalam artikel Surat Kabar Suara Karya, 29 April 1982 hal yang berjudul "Warga KORPRI harus menusuk

Golkar". Pemberitaan tersebut membuktikan bahwa pemilu masa orde baru selalu di barengi adanya mobilisasi massa untuk mendukung Golkar dalam pemilu. Terlihat jelas bahwa Mendagri selaku pembina KORPRI pusat mengintruksikan kepada KORPRI yang dipimpinnya untuk memberikan monoloyalitasnya kepada Golkar. Selain itu juga, Mendagri Amir Machmud juga mengingatkan bahwa KORPRI dan ABRI harus fanatik kepada Pancasila dan UUD 1945, karena mereka merupakan mekanisme demokrasi Pancasila yang ampuh. Hal itu terdapat dalam Koran Suara Karya, 30 April 1982 yang berjudul "ABRI dan KORPRI Harus Fanatik Terhadap Pancasila". Amir Machmud selaku pembina KORPRI, mengingatkan kepada keluarga besar KORPRI untuk tidak bersikap muka dua dan tidak loyal. Kepada para Gubernur dan Bupati, Amir Machmud menginstruksikan untuk menindak setiap "KORPRI Gadungan" yang tidak loyal".²⁴

Pemberitaan tersebut telah mengindikasikan bahwa adanya upaya mobilisasi massa pada ABRI dan KORPRI untuk loyal terhadap Golkar. Selain itu, pemerintah melakukan intervensi dengan cara memberikan ancaman untuk menakuti para pegawai negeri KORPRI yang tidak loyal kepada Golkar. Pegawai KORPRI yang tidak loyal akan dikenakan sanksi dari departemen kepegawaian dan kantor tempat ia bekerja.

Dalam Surat Kabar Suara Karya, 25 Mei 1982 yang berjudul "Monoloyalitas KORPRI Hanya Kepada Pancasila Dan UUD 1945", Wakil Sekjen KORPRI Sukarton juga menegaskan bahwa: "Sebagai warga negara, setiap anggota KORPRI punya hak pilih untuk menyalurkan hak pilih setiap anggota. KORPRI sudah menetapkan pendiriannya yaitu menyalurkan aspirasi politiknya kepada kekuatan sosial politik yang cocok dengan asas dan perjuangan KORPRI. Satu – satunya kekuatan sosial politik yang cocok dengan asas dan perjuangan KORPRI sampai sekarang baru Golongan Karya yang sejak orde baru sampai sekarang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, kalau ada anggota KORPRI yang tidak memilih tanda gambar Golkar pada pelaksanaan pemilu 1982 yang lalu berarti ia belum menghayati Sapta Prasetya KORPRI."²⁵

Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa monoloyalitas KORPRI dikatakan hanya kepada pemerintah namun dalam penerapannya KORPRI masih tetap terikat dengan Golkar. KORPRI harus tetap menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar yang memiliki asas dan perjuangan yang sama yakni berasaskan Pancasila dan UUD 1945. KORPRI menjadi mesin politik bagi Golkar untuk memenangkan pemilu 1982 dan melanggengkan kekuasaan orde baru.

D. Politisasi KORPRI Pada Pemilihan Umum Tahun 1987 Di Jawa Timur

²² *Suara Karya*, 6 April 1982 hal 6 yang berjudul "Para Pegawai Harus Berjiwa Pejuang"

²³ *Suara Karya*, 14 April 1982 hal 1 yang berjudul "Jangan Malu Dan Takut, Tunjukkan Identitas KORPRI Di Tengah – Tengah Masyarakat"

²⁴ *Suara Karya*, 30 April 1982. hal 1-2 yang berjudul "ABRI dan KORPRI Harus Fanatik Terhadap Pancasila"

²⁵ *Suara Karya*, 25 Mei 1982. hal. 1-2 yang berjudul "Monoloyalitas KORPRI Hanya Kepada Pancasila Dan UUD 1945"

Pemilihan umum tahun 1987 merupakan pemilihan umum yang keempat pada masa orde baru. Pemilihan umum tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Menjelang pemilihan umum 1987, pemerintah melakukan pembatasan terhadap perkembangan partai politik. Pembatasan terhadap partai politik dilakukan pemerintah dengan cara memutuskan hubungan antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Pemutusan hubungan antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1985 merupakan perubahan dari Undang Nomor 3 Tahun 1975. Undang Nomor 3 Tahun 1975 dilakukan perubahan karena Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang sebelumnya telah menentukan asas bagi partai politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan Undang – Undang 1945 mendapat penolakan dari partai politik. Undang Nomor 3 Tahun 1975 juga telah memberikan ruang bagi partai politik untuk menggunakan asas atau ciri yang lain. Oleh karena itu ketentuan tentang penegasan Pancasila sebagai asas tunggal kembali diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1985 merupakan Undang - Undang yang mengatur ketentuan penegasan Pancasila sebagai asas tunggal telah menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik maupun dalam organisasi kemasyarakatan lainnya. Keberhasilan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal menguntungkan bagi Golkar. Golkar merasa diuntungkan karena adanya perbedaan program antara dua partai politik dan Golkar sehingga dalam program partainya Golkar dapat menyuarakan pembangunan.

Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1985 telah merugikan partai politik lainnya seperti PPP. PPP sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik bagi umat Islam diwajibkan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan diterimanya asas tunggal Pancasila tersebut, maka PPP harus mengganti dengan asas Pancasila dan lambang Ka'bah diganti dengan lambang bintang. Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1985 juga telah menandai berakhirnya kehidupan partai politik islam dalam pemerintahan Indonesia. Partai politik islam dianggap berbahaya bagi negara karena partai politik islam akan membangkitkan pergerakan islam dan menjadikan islam sebagai ideologi negara sehingga islam akan menguasai parlemen pemerintahan. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1985 yang telah mewajibkan partai politik dan Golongan karya untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu satunya asas tunggal, maka kekhawatiran lahirnya ideologi Islam sebagai ideologi tandingan Pancasila pun akhirnya hilang.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan PP Nomor 18 Tahun 1986. Ketentuan PP Nomor 19 Tahun 1986 mengatur secara terperinci mengenai kewajiban, larangan, pengawasan, dan sanksi bagi partai politik dan

Golkar. PP Nomor 18 Tahun 1986 secara jelas dibuat untuk melindungi ideologi negara Pancasila. PP Nomor 19 Tahun 1986 ini telah memaksa partai politik untuk menerima Pancasila sebagai satu- satunya asas tunggal serta membuat partai politik wajib untuk merubah program partai agar tidak menyimpang dan bertentangan dengan asas Pancasila. Apabila PP tersebut dilanggar maka partai politik yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yaitu akan dilakukan pembekuan pengurus partai politik.

Adanya PP Nomor 19 Tahun 1986 ini telah merugikan partai politik karena partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi politik bagi masyarakat, serta tidak mampu menjamin demokrasi sehingga partai politik masa orde baru hanya menjadi sarana legitimasi bagi kekuasaan.Penerapan PP Nomor 19 Tahun 1986 telah menjadikan kekuasaan presiden semakin kuat sehingga pemerintah dengan mudah mengontrol pemerintahan. Hal tersebut juga menjadikan kesempatan bagi Golkar untuk memenangkan pemilihan umum 1987. Berikut ini tabel perolehan suara dalam pemilihan umum 1987 :

Tabel
Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum 1987

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara Yang Diperoleh Tiap Organisasi			
		Suara Masuk	PPP	Golkar	PDI
1	D.I.Aceh	11.449.996	637.320	740.721	71.955
2	Sumut	4.336.077	600.672	3.125.267	610.138
3	Sumbar	11.369.841	287.266	1.058.952	23.623
4	Riau	11.240.457	185.795	987.933	66.729
5	Sumsel	25.368.268	454.898	1.619.788	293.582
6	Jambi	849.670	74.661	748.122	26.887
7	Bengkulu	507.388	52.579	425.165	29.244
8	Lampung	2.120.471	161.687	1.826.579	132.205
9	Jabar	16.072.627	2.221.416	11.379.082	2.472.129
10	Jakarta	3.906.866	844.445	1.936.738	1.125.683
11	Jateng	14.351.420	2.616.493	9.785.711	1.949.216
12	D.I.Y	1.570.208	227.283	1.102.738	240.187
13	Jatim	17.128.483	3.549.319	12.704.895	1.374.269
14	Kalbar	1.337.211	220.818	906.029	210.364
15	Kalteng	657.617	57.217	584.587	15.813
16	Kalsel	1.216.614	301.345	874.105	41.164
17	Kaltim	745.548	159.760	502.994	82.749
18	Sulut	1.155.055	68.120	995.429	91.506
19	Sulteng	783.926	94.188	650.870	38.868
20	Sultra	598.319	11.905	581.115	5.299
21	Sulse	3.354.320	301.564	3.014.174	38.582
22	Bali	1.514.208	25.243	1.328.516	159.449
23	NTB	1.474.481	174.561	1.218.003	81.917
24	NTT	1.407.839	19.804	11.336.988	51.047
25	Maluku	666.001	83.637	541.468	40.896
26	Irian Jaya	536.528	13.965	499.662	22.901
27	Timtim	362.048	2.654	339.231	20.163
	Jumlah	83.081.487	13.450.015	60.314.862	9.316.610

Sumber: Jawa Pos, 25 April 1987

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perolehan suara Golkar naik drastis di Jawa Timur dalam pemilu 1987. Sedangkan perolehan suara PPP menurun. Penurunan suara PPP terjadi karena perubahan asas Islam menjadi pancasila, selain itu juga disebabkan oleh keluarnya NU dari PPP sehingga memperparah kemelut di tubuh PPP. NU kembali ke khittah 1926 pada Mukthamar NU di Situbondo tahun 1984 yang kemudian di susul peristiwa pengembosan NU atas PPP. Pengembosan NU atas PPP disertai keluarnya kader NU dari PPP kemudian orang NU tersebut masuk daftar calon kader Golkar dalam pemilu 1987.

Faktor penyebab kekalahan PPP dalam pemilu 1987 terbagi menjadi 2 yakni faktor ekstern dan intern. Menurut Mahfud Sidiq seorang tokoh PPP mengemukakan bahwa kekalahan PPP yang utama adalah

Golkar memanfaatkan hasil keputusan Mukhtar NU Situbondo. Mereka memanfaatkan sedemikian rupa sehingga bekas pendukung PPP, yang mayoritas warga NU, bisa meninggalkan PPP. Penyebab lainnya, adalah adanya upaya memojokkan figur Naro, yang sebelumnya banyak di puja. Akibatnya banyaknya pihak yang menjelek - jelekkan Naro, warga NU menjadi terpengaruh, dan berbalik memusuhinya. Faktor lainnya, telah terjadi pergeseran kepemimpinan di desa – desa. Sebelumnya figur kyai atau santri menjadi figur sentral yang banyak di jadikan panutan. Tetapi hal itu mulai bergeser dan masyarakat lebih dekat kepada pemimpin formal.²⁶

Kekalahan NU terjadi di seluruh daerah di Indonesia, sedangkan Golkar unggul dengan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu ini. Dalam menyukseskan pemilu 1987, pemerintah dan Golkar melakukan berbagai upaya untuk memenangkan pemilu 1987 di Jawa Timur. Upaya yang dilakukan Golkar, antara lain dengan menjadikan KORPRI sebagai mesin politik yang loyal terhadap pemerintah serta berkewajiban untuk memberikan dukungannya terhadap Golkar dalam setiap pemilu. Pemilu orde baru selalu dibarengi dengan adanya mobilisasi dikalangan pegawai negeri. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan pemberitaan yang terdapat dalam Surat Kabar Jawa Pos, 6 Mei 1986 yang berjudul “Masih Ada Warga KORPRI yang Belum Ikut Karakterdes”.

Ketua DPD II Golkar Surabaya, Alim Soedarsono dalam acara santiaji mensukseskan pemilu 1987 mengatakan: “Masih ada warga KORPRI yang belum mengadakan kontak kerjasama dengan fungsionaris Golkar atau mengikuti karakterdes, ditempat tinggal mereka. Padahal langkah itu perlu demi suksesnya Golkar dalam pemilu mendatang. Anggota KORPRI, berkewajiban mengadakan pendekatan dengan para keluarga dan tetangga dan untuk membantu suksesnya program Golkar. Enam puluh persen dari daftar pemilih dalam pemilu nanti, dari kalangan generasi muda. Karena itu, ditempat – tempat yang belum memiliki kader fungsional, hendaknya segera dibentuk.”²⁷

Pemberitaan tersebut, mengindikasikan bahwa terjadi politisasi dalam KORPRI. *Pertama*, menjelang pemilu warga KORPRI harus mengadakan kontak kerjasama dengan fungsionaris Golkar atau mengikuti karakterdes. Karakterdes wajib di ikuti warga KORPRI agar seluruh KORPRI memberikan dukungannya untuk Golkar dalam pemilu. *Kedua*, KORPRI juga berkewajiban mengadakan pendekatan dengan para keluarga dan tetangga dan untuk membantu suksesnya program Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa Golkar menanamkan pengaruh politiknya sampai titik terkecil melalui KORPRI. Anggota KORPRI yang mencakup seluruh pejabat - pejabat di pedesaan seperti kepala desa yang sebelumnya dalam pemilihan umum 1982 telah di daftarkan menjadi pegawai negeri harus mendukung Golkar. Para anggota keluarga KORPRI beserta kerabat dan tetangga pun di galang untuk mendukung Golkar.

Maka dengan cara ini anggota KORPRI yang berada di pedesaan dan berbagai Provinsi akan memberikan aspirasinya kepada Golkar.

Menjelang pemilihan umum 1987 di Jawa Timur pemerintah berusaha mencari dukungan dengan memberikan surat edaran kepada KORPRI dengan tujuan agar KORPRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum 1987. Pemerintahan mengeluarkan surat edaran kepada pegawai negeri, yang isinya mengingatkan terhadap statusnya sebagai anggota KORPRI yang harus mendukung Golkar. Hal tersebut diberitakan dalam Surat Kabar Jawa Pos 15 Mei 1986 yang berjudul Akan “Ada Surat Edaran untuk Anggota KORPRI”.

Dalam surat kabar tersebut AE. Manihuruk, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang juga Sekjen KORPRI mengatakan bahwa :“ Surat edaran seperti itu, sebenarnya bukan masalah baru. Setiap menjelang pemilu , pemerintah selalu mengeluarkan surat edaran yang sama. Disamping itu, tujuan pokok surat edaran sudah bisa ditebak . Mengingat KORPRI adalah pendukung salah satu kontestan pemilu, yakni Golkar. Dengan demikian jika semua anggota KORPRI mencoblos tanda lambang Golkar , maka berarti Golkar akan mengantongi suara sekitar 4 juta, sesuai dengan jumlah anggota KORPRI. Sebagai anggota KORPRI tentu mereka harus konsisten dengan korpsnya sebagai pendukung Golkar.”²⁸

Pernyataan diatas menunjukkan gejala politisasi dalam bentuk mobilisasi Golkar kepada KORPRI. Menjelang pemilihan umum pemerintah selalu memberikan surat edaran kepada KORPRI yang berisi peringatan agar KORPRI memberikan loyalitasnya untuk mendukung Golkar. KORPRI memiliki kewajiban untuk mendukung Golkar dalam setiap pemilu Orde baru. Upaya yang dilakukan Golkar untuk memenangkan pemilu juga dilakukan dengan mobilisasi massa untuk menghimpun massa di daerah serta melakukan pembinaan kader kader baru yang dipersiapkan untuk pemilu yang akan datang.

E. Politisasi KORPRI Pada Pemilihan Umum 1992 Di Jawa Timur

Pemilihan umum 1992 merupakan pemilihan umum yang kelima pada masa orde baru. Pemilihan umum 1992 dilaksanakan pada 9 Juni 1992. Dalam pemilu 1992 pemerintah melarang kepada seluruh OPP untuk tidak melakukan pawai – pawai di jalan dengan mengendarai motor untuk menghindari kekerasan saat berkampanye. Selain itu, pawai – pawai di jalan dengan mengendarai motor dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, melakukan kerusakan, mengendarai motor tanpa helm, berboncengan lebih dari seorang, dan kendaraan yang digunakan pawai tanpa dilengkapi dengan surat surat yang lengkap.

Menjelang pemilihan umum 1992 Golkar mengadakan kampanye. Kampanye yang digelar Golkar menjelang pemilu 1992 mampu menyerap massa terbanyak bila dibandingkan dengan organisasi peserta

²⁶ Jawa Pos, 25 April 1987 hal IV yang berjudul “Karena Menang Hampir 100 Persen maka Diadakan Musyawarah”

²⁷ Jawa Pos, 6 Mei 1986. hal 11 yang berjudul “Masih Ada Warga KORPRI yang Belum Ikut Karakterdes”

²⁸ Jawa Pos, 15 Mei 1986 hal 1 yang berjudul “Ada Surat Edaran untuk Anggota KORPRI

pemilu lainnya, PPP dan PDI. Kebijakan *floating mass* dalam kampanye Golkar lebih difokuskan dikelurahan dan desa. Dalam hal ini terjadi pembatasan ruang gerak bagi Organisasi Peserta Pemilu PPP dan PDI. Golkar berusaha untuk menggalang massa dari bawah, dan berusaha mendapatkan simpati dari rakyat bawah.

Warga masyarakat yang menghadiri kampanye Golkar adalah kader – kader Golkar yang telah digalang selama lima tahun sebelum kampanye dimulai. Kader kader Golkar yang digalang selama 5 tahun ini terdiri dari pegawai negeri dan sebagian non – PNS. Golongan ini bisa ditandai dengan seragam mereka dan menjadi “undangan kehormatan” sehingga mereka duduk di kursi – kursi yang di sediakan panitia. Dan hal ini biasanya terjadi pada kampanye – kampanye kelurahan.²⁹ Dekatnya Golkar dengan birokrasi menguntungkan Golkar sebab Golkar mendapat dukungan penuh dari pegawai negeri, dan pengusaha hal ini lah yang membuat Golkar semakin besar, kuat dan mampu menanamkan legitimasi di dalam pemerintahan. Golkar menjadi pemenang pemilu setiap pemilihan orde baru. Berikut ini tabel perolehan suara pemilihan umum 1992 :

Tabel
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum 1992

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara Masuk	Jumlah Suara Yang Diperoleh Tiap Organisasi		
			PPP	Golkar	PPP
1.	D.I. Aceh	1.819.087	637.571	1.049.021	132.459
2.	Sumut	4.929.546	543.047	3.519.987	866.512
3.	Sumbar	2.002.413	283.991	1.644.289	74.133
4.	Riau	1.706.074	249.249	1.298.863	157.962
5.	Jambi	1.086.984	53.462	982.792	50.730
6.	Sumsel	3.203.668	384.895	2.234.941	583.832
7.	Bengkulu	623.188	35.830	535.169	52.189
8.	Lampung	3.170.441	115.052	2.866.456	188.933
9.	DKI Jakarta	4.422.002	1.085.126	2.314.584	1.022.292
10.	Jabar	18.930.318	2.843.349	13.318.954	2.769.015
11.	Jateng	15.511.889	3.559.249	8.599.460	3.353.180
12.	D.I. Yogyakarta	1.684.413	343.649	987.232	353.532
13.	Jatim	18.783.459	4.741.745	11.038.479	3.003.235
14.	Kalbar	1.645.777	238.943	1.051.969	354.865
15.	Kalteng	774.269	61.949	665.046	47.214
16.	Kaltim	898.297	163.065	546.256	188.976
17.	Kalsel	1.418.330	301.216	984.099	132.970
18.	Bali	1.728.130	34.466	1.352.903	340.761
19.	NTB	1.640.538	184.451	1.283.525	172.562
20.	NTT	1.784.188	32.976	1.624.535	126.677
21.	Timtim	369.046	5.196	305.401	58.449
22.	Sulsel	3.796.660	293.697	3.410.910	92.053
23.	Sulteng	933.601	103.265	753.289	77.047
24.	Sulut	1.455.456	65.941	1.284.713	104.802
25.	Sulra	706.586	12.993	666.737	26.856
26.	Maluku	904.414	144.439	665.612	94.363

Sumber: *Jawa Pos*, 12 Juni 1992

Perolehan suara Golkar secara nasional turun dalam pemilu 1992. Perolehan suara Golkar turun amat mencolok rata – rata turun sepuluh persen. Pergeseran perolehan suara Golkar dan naiknya suara PPP dan PDI di pengaruhi oleh tiga faktor, antara lain :³⁰

Pertama, Derajat demokrasi pemilu 1992 di Jawa, jauh lebih baik dari pada derajat pemilu - pemilu sebelumnya. Demokrasi ini terwujud karena peranan LPU dan PPI yang diketuai oleh Rudini. Rudini dalam pemilu

kali ini telah memberikan kelonggaran kepada yang lumayan kepada PPP dan PDI serta menekan birokrasi untuk bersikap lebih netral. Larangan Rudini agar gubernur, bupati, camat, dan lurah tidak terlibat dalam kampanye salah satu OPP. Larangan tersebut jelas mempengaruhi penampilan birokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian mereka tidak bisa terlibat langsung membantu perolehan suara Golkar.

Kedua, Arus perubahan sosial selama lima tahun belakangan ini mempengaruhi kemerosotan perolehan suara Golkar. Tingkat kesejahteraan yang meningkat , kemampuan baca tulis yang semakin tinggi, eksposer media massa yang semakin besar, dan tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan proporsi masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan politik semakin besar. Sementara memasuki pemilu 1992 Golkar di bebani isu yang sangat berat misalnya monopoli cengkeh dan jeruk, kenaikan iuran TVRI, dan isu – isu monopoli lainnya serta isu tentang keadilan sosial. Semua itu telah menyebabkan Golkar menjadi defensif.

Ketiga, Telah terjadi proses realignment , terutama untuk pemilih santri di kantong – kantong santri dan abangan. PPP berani mendekati kyai bahkan mencalonkan kyai menjadi anggota DPR / MPR atau paling tidak mantu kyai atau orang – orang terdekat kyai yang dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Meskipun suara Golkar mengalami penurunan, namun Golkar tetap unggul pada pemilu 1992 di Jawa Timur. Kemenangan Golkar di dukung oleh pegawai negeri KORPRI. Dalam Surat Kabar Kompas, 6 November 1991 yang berjudul “Tidak benar, Pegawai Negeri Loyal Mutlak kepada Golkar”. Mendagri Rudini, selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI mengatakan bahwa: “Pegawai negeri yang terhimpun di dalam KORPRI bebas menyalurkan aspirasi politiknya melalui ketiga orsospol . Hanya saja, jika diantara mereka ada yang ingin memasuki salah satu dari orsospol , termasuk Golkar , mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada atasan. Golkar berhasil menggarap KORPRI sehingga sebagian besar dari mereka masuk Golkar.”³¹

Dari pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa KORPRI bebas menyalurkan aspirasi politiknya melalui ketiga orsospol namun harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan. Dalam prakteknya sangatlah berbeda, KORPRI yang ingin masuk ke partai politik dipersulit ijinnya bahkan tidak memperoleh ijin dari atasan, sedangkan pegawai negeri KORPRI yang ingin menjadi kader simpatisan Golkar maka akan dipercepat ijinnya oleh atasan, hal ini telah membuktikan adanya diskriminasi yang membedakan perlakuan antara ijin masuk partai politik dan ijin masuk kader Golkar. Dalam hal ini secara jelas bahwa pegawai negeri yang tergabung dalam KORPRI merupakan kader Golkar yang selalu mendukung Golkar untuk memenangkan Golkar pada setiap pemilu orde baru.

²⁹ Rindang Herawati dalam artikel “Golkar Membangun Tren Baru”. *Jawa Pos*, 2 Juni 1992

³⁰ Afan Gaffar, “Suara Partai dan The Rudini Factor” dalam *Jawa Pos*, 12 Juni 1992 hal 1

³¹ *Kompas* , 6 November 1991. hal. 1 yang berjudul “Tidak benar, Pegawai Negeri Loyal Mutlak kepada Golkar”

Dalam pemilu 1992 Golkar melalui berbagai upaya memaksa pegawai negeri yang berada di bawah naungan KORPRI untuk tunduk pada kebijakan monoloyalitasnya. Golkar dapat dikatakan sebagai organisasi orsospol yg strategi pengorganisasian melalui mobilisasi massa secara vertikal. Pengorganisasian massa secara vertikal seperti halnya organisasi yang ada pada militer. Pengorganisasian massa secara vertikal sangatlah efektif, karena dapat memperkuat pengaruhnya dari pusat sampai ke desa - desa dan daerah. Pengorganisasian massa secara vertikal yang dilakukan oleh Sekber Golkar bertujuan agar pemerintahan tetap terpusat sehingga pemerintah mudah untuk mengawasi dan mengendalikannya.

Dalam prakteknya pengorganisasian massa secara vertikal ini dilakukan dengan cara membentuk kader – kader dari pusat hingga ke daerah. Kader – kader tersebut terdiri dari Lurah, Camat, Bupati yang termasuk bagian dari pegawai pemerintahan itu kemudian diberikan posisi jabatan yang penting dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan nama *kooptasi*. Kemudian Lurah, Camat, Bupati dan perangkat desa lainnya selanjutnya ditugaskan untuk menanamkan pengaruh dalam masyarakat desa untuk mendukung Golkar. Desa yang lurahnya tidak berhasil memenangkan Sekber Golkar dalam pemilihan umum akan mengalami penundaan pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, dan sanitasi lingkungan.³²

Pengorganisasian massa Golkar secara vertikal dilakukan dengan cara membentuk kader – kader dari pusat hingga ke daerah. Hal ini dapat terlihat dalam sebuah kasus di Bangkalan yang diberitakan dalam koran Jawa Pos, 17 Juni 1992 dengan berjudul: “Kepala desa Gebang, Kecamatan Bangkalan menutup kantor desa gara – gara Golkar kalah dalam pemilu 1992”.

Kepala desa Gebang, Kecamatan Bangkalan yang bernama Tyb, 50 tahun menutup kantor desa karena perolehan suara Golkar di desanya kalah dengan PPP. Pada pemilu 1987 Golkar menang atas OPP lainnya. Namun ketika di pimpin Kades Tyb yang baru dilantik sekitar tahun 1988, pada pemilu 1992 suara Golkar melorot di bawah PPP. Perbandingannya 494 dan 375. Sejak mengetahui bahwa Golkar kalah di desanya, Tyb lalu tidak pernah keluar rumah. Bahkan kantor balai desa juga di tutup. Akibatnya warga setempat menjadi resah, setiap kali mereka mengurus keperluan di balai desa selalu tidak mendapat pelayanan.

Kasus diatas menyatakan bahwa Kepala desa Gebang, yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri afiliasi politiknya pada Golkar. Dalam contoh kasus diatas mengindikasikan adanya politisasi yang berupa kooptasi dan mobilisasi. Kepala desa yang terkooptasi akan menjadi kader Golkar. Kepala desa tersebut akan berusaha menggalang dukungan dari warganya (mobilisasi) untuk memenangkan Golkar di daerahnya. Keuntungan yang di dapatkan kepala desa apabila berhasil memenangkan Golkar di daerahnya adalah kenaikan promosi jabatan atau dapat mempertahankan posisi

jabatannya sebagai kepala desa dan tetap memimpin desa pada periode berikutnya. Kepala desa yang mampu memenangkan Golkar di desanya akan mendapatkan keistimewaan yaitu akan dilaksanakan pembangunan sarana prasarana fisik di desanya.

Indikator lain adanya politisasi yaitu tindakan kepala desa Gebang yang menunjukkan sikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terganggunya kegiatan administratif negara. Di karenakan kekalahan Golkar dalam pemilu 1992 di desanya, kepala desa yang merupakan abdi negara yang berkewajiban untuk melayani masyarakat menutup kantor desa dan tidak mau melayani warganya yang memerlukan surat atau membayar rekening listrik.

Kepala desa Gebang yang tidak berhasil memobilisasi warganya untuk memenangkan Golkar di desanya itu merasa kecewa pada warganya dan menganggap bahwa warganya tidak mau membantu dirinya untuk memenangkan Golkar dalam pemilu 9 Juni yang lalu di desanya. Akibatnya kepala desa juga menutup layanan tangki air bersih. Tangki air yang biasanya memasok air bersih bagi warganya itu merupakan bantuan dari pemerintah. Tangki air bersih bantuan dari pemerintah itu di tutup padahal keberadaan tangki air tersebut amat penting bagi warga desa karena letak yang dekat dengan laut maka air sumur di desa setempat rasanya asin , sehingga untuk keperluan minum mereka harus membeli dari tangki air tersebut dengan harga Rp 75 per ember.

F. Politisasi KORPRI Pada Pemilihan Umum 1997 Di Jawa Timur

Pemilihan umum 1997 merupakan pemilihan umum yang keenam dan terakhir pada masa orde baru. Pemilihan umum 1997 dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Sebelum pemilu berlangsung ditandai oleh konflik internal dilingkungan PDI. Megawati Soekarno Putri yang terpilih sebagai ketua umum PDI pada Munas PDI tahun 1993 semestinya tetap menjadi ketua hingga 1997. Namun ditahun 1996, pemerintah melakukan intervensi dengan merestui Kongres IV di Medan pada Mei 1996, dari Kongres tersebut Suryadi terpilih lagi menjadi ketua umum PDI.

Puncak dari konflik internal PDI adalah peristiwa Tragedi Sabtu Kelabu yang terjadi pada 27 Mei 1996. PDI Suryadi berusaha mengambil alih kantor DPP PDI yang masih dikuasai oleh kubu Megawati lewat kekesaran yang menimbulkan korban ratusan PDI pro Megawati terluka.³³ Akibat dari konflik internal itu, kubu PDI pro Megawati kemudian berhasil menggembosi PDI kubu Suryadi, sehingga hasil pemilu 1997 menunjukkan penurunan drastis perolehan suara dan kursi PDI , seperti tampak pada tabel berikut ini :

³² *OpCit* ., Syafulan Rozi hal. 43-44

³³ Suwarno. 2012. “ *Sejarah Politik Indonesia Modern*” . Yogyakarta : Penerbit Ombak. hal. 108

Tabel
Hasil Perhitungan Suara Pemilu 1997

Daerah Pemilihan	PPP	Golkar	PDI
1. DKI Jakarta	2.191.368	3.976.146	116.058
2. Jabar	6.018.193	16.582.061	396.083
3. Jateng	4.954.606	11.669.796	468.425
4. DI Yogyakarta	595.740	1.088.322	56.134
5. Jatim	6.746.293	12.559.638	631.925
NASIONAL	25.300.690	83.324.462	3.425.925
	22,9%	74,3%	3,2 %

Sumber : Jawa Pos, 5 Juni 1997

Perolehan suara PDI di Jawa Timur dalam pemilu 1997 menurun dan anjlok. Gonjang – ganjing PDI sejak tahun 1993 berpengaruh terhadap perolehan suara PDI di Jawa Timur . Pada pemilu 1997, Isu koalisi Mega – Bintang yang merebak selama kampanye pemilu mampu mendongkrak perolehan suara PPP di Jawa Timur.

Dari hasil perhitungan suara hasil pemilu 1997 kemarin membuat PDI terpuruk. Sementara PPP dan Golkar bersaing ketat. Penurunan perolehan suara PDI di Jawa Timur disebabkan oleh banyaknya suara yang tidak sah alias golput yang sengaja dirusak suaranya. Ada yang mencoblos semua tanda gambar, ada yang mencoblos dua tanda gambar sekaligus, dan juga ada pendukung PDI yang pro Mega ikut masuk ke bilik suara dengan membawa kartu suara. Tapi dalam bilik pencoblosan itu pemilih tidak mencoblos melainkan menempel stiker kecil yang bertuliskan pro Mega.

Merosotnya suara PDI, membuat perolehan suara Golkar mengalami kenaikan. Kenaikan perolehan suara Golkar dalam pemilu 1997 juga berkat dukungan dari KORPRI, seperti yang diberitakan dalam artikel koran Kompas , 26 September 1996 yang berjudul “Mendagri : KORPRI harus dukung Golkar”. Koran tersebut memberitakan bahwa enam juta warga KORPRI ditekan kembali untuk mendukung Golkar supaya orsospol itu kembali meraih suara terbanyak dalam pemilu 1997. Mendagri Yogie SM di hari pertama Rakernas KORPRI mengemukakan bahwa : “KORPRI dan Golkar itu sejalan dalam aspirasi dan perjuangannya, sehingga masyarakat awam tidak dapat membedakan antara Golkar dan KORPRI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa warga KORPRI adalah bagian dari Golkar sebagai “pemegang saham” apa yang disebut jalur B (birokrasi) Golkar.”³⁴

Dalam pemberitaan tersebut, Ketua KORPRI pusat Surjatna Soebrata yang didampingi Sekjen KORPRI Pusat Waskito dengan tegas menyatakan bahwa: “Sukses Golkar adalah bagian dari kewajiban seluruh warga

KORPRI. Warga KORPRI wajib meraih dua sukses, yaitu sukses teknis sebagai penyelenggara pemilu, dan sukses politis sebagai kader Golkar. Sebagai kader Golkar harus menyukseskan Golkar dan Warga KORPRI juga mesti berperan secara baik dan benar dalam kapasitas mereka sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.”³⁵ Bahkan saat ditanya mengapa pegawai negeri wajib mendukung Golkar, Surjatna menyatakan bahwa : “Pegawai negeri wajib mendukung Golkar itu merupakan ketentuan hasil Munas KORPRI, jadi itu memang menjadi urusan intern KORPRI.”

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa KORPRI bagian dari Golkar. KORPRI harus memberikan monoloyalitas politiknya pada Golkar sesuai dengan hasil Munas KORPRI. KORPRI memiliki kewajiban untuk loyal, mendukung dan memenangkan Golkar dalam pemilu 1997. Upaya lain yang dilakukan Golkar menjelang pemilu 1997 di Jawa Timur adalah dengan mengadakan kampanye Golkar di Surabaya. Golkar berupaya menggalang massa dengan membentuk Gomadsu . Hal tersebut diberitakan dalam surat kabar Jawa Pos 6 April 1997 bahwa “Golkar Surabaya Utara membentuk Gomadsu (Golkar Madura Surabaya Utara)” H. Hanafi Mulim, pengurus Golkar Surabaya mengaku bahwa : “Gomadsu adalah para pendukung dan kader Golkar. Gomadsu terbentuk dari hasil pembicaraan secara spontanitas dan temporer antar kader Golkar pada akhir Desember 1996. Gomadsu memiliki tugas diantaranya adalah menindaklanjuti ucapan Presiden Soeharto beberapa waktu lalu untuk memberantas setan gundul (yang suka melanggar aturan yang ada). Jadi kami menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. Karena mereka mengajak para pemuda yang biasa minum minuman keras, berjudi, atau mencuri kembali kejalan yang benar dan kami bina untuk menjadi bagian dari Golkar”³⁶

Pemilu 1997 juga diwarnai dengan adanya kooptasi. Hal tersebut diberitakan dalam koran Jawa Pos Jum’at 30 Mei 1997 yang berjudul “Bisa – Bisa Saya Di Copot dari Jabatan”. Dalam pemberitaan koran Jawa Pos tersebut bahwa ketua RT Menanggal, Gayungan merasa kaget ketika melihat hasil pemungutan suara yang saat itu dimenangkan oleh PPP. Ketua RT Menanggal berucap : “Waduh, alamat ! bisa – bisa saya di copot dari jabatan ketua RT ini. Ternyata Partai Persatuan Pembangunan menang di tempatnya .“ Kemudian disahuti oleh warga lainnya, begini : “Dari RT tapi malah dijadikan lurah pak! Selama ini , Golkar selalu menang di wilayah itu. Dan kali ini giliran PPP yang menang mutlak. Di TPS 2 itu, untuk tingkat pusat PPP mengantongi 263 suara, Golkar 196 suara, dan PDI 20 suara.”³⁷

Selain itu hal yang sama juga di rasakan oleh Sumari yang seorang pegawai negeri, dirinya mengaku takut dan cemas bila tidak memilih Golkar. Sumari mengungkapkan ketakutannya itu dalam pemberitaan

³⁴ Kompas , 26 September 1996 yang berjudul “Mendagri : KORPRI harus dukung Golkar”.

³⁵ Ibid., Kompas , 26 September 1996 yang berjudul “Mendagri : KORPRI harus dukung Golkar”.

³⁶ Jawa Pos, 6 April 1997 yang berjudul “Golkar Surabaya Utara membentuk Gomadsu (Golkar Madura Surabaya Utara)”

³⁷ Jawa Pos, 30 Mei 1997 yang berjudul “Bisa – Bisa Saya Di Copot dari Jabatan”

surat kabar Jawa Pos, 30 Mei 1997. Sumari mengungkapkan bahwa :“Sebagai pegawai negeri saya sangat takut dan cemas bila tidak bisa memilih. Kalau tidak memilih, kan pekerjaan saya terancam.”³⁸

PENUTUP

Simpulan

Politisasi KORPRI adalah suatu keadaan dilibatkannya KORPRI dalam proses pemenangan peserta pemilu dalam suasana struktur dan kultur politik yang belum demokratis, otoritarian dan diskriminatif, yang dilakukan oleh pemerintah rezim orde baru untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.

Adapun indikator yang bisa digunakan untuk mengukur adanya politisasi KORPRI dalam pemilu orde baru 1970 – 1998 di Jawa Timur antara lain: (1) KORPRI dijadikan bagian dari faksi Golkar. (2) Pembesaran jumlah PNS secara kuantitatif sebagai kantong kader dan pendukung Golkar. (3) Pemerintah menetapkan kebijakan PP No. 6 Tahun 1970 Tentang monoloyalitas KORPRI pada Golkar. (4) Diskriminasi pelayanan publik terhadap non Golkar yang menyebabkan terganggunya kegiatan administratif negara. (5) Kooptasi dan mobilisasi politik pada pegawai negeri untuk memenangkan Golkar dalam pemilu orde baru.

Politisasi KORPRI dalam pemilu 1970 – 1977 di dukung oleh kebijakan PP No. 6 Tahun 1970 tentang monoloyalitas KORPRI pada Golkar. Pemilihan umum 1970 – 1977 menunjukkan adanya gejala politisasi yang di tandai dengan kooptasi dan mobilisasi masyarakat secara vertikal, pengekangan kebebasan individu dan kelompok dalam kebijakan yang di tetapkan secara legal dan mendapat legitimasi oleh pusat. Sedangkan politisasi dalam pemilu 1982 – 1987 di dukung oleh kebijakan *floating mass* (massa mengambang). Kebijakan *floating mass* telah memangkas komunikasi politik rakyat dengan partai politik lainnya. Kebijakan ini membatasi dan melarang partai politik untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya dan berkampanye di daerah pedesaan dan sampai di tingkat Kecamatan. Keuntungan yang di dapat Golkar sebagai non partai politik adalah Golkar dapat melakukan kaderisasi hingga ketinggian bawah sampai ke desa dan membatasi ruang gerak dari partai politik. Untuk politisasi KORPRI dalam pemilu 1992 – 1997 di dukung oleh keduanya, monoloyalitas pegawai negeri pada Golkar dan kebijakan *floating mass*, selain itu Golkar melakukan politisasi pada pemilihan umum 1992 – 1997 di tandai dengan adanya surat edaran untuk KORPRI menjelang pemilu, Pemerintah juga melaksanakan pelatihan Karakterdes untuk mencoblos kartu Golkar dengan benar. Para pegawai negeri mempunyai kewajiban untuk menggalang keluarganya, ibu – ibu dharmawanita untuk mendukung Golkar.

Dampak politisasi KORPRI pada pemilu orde baru di Jawa Timur terhadap demokrasi di Indonesia antara lain: (1) Politisasi telah menghasilkan ketidakadilan dalam kehidupan politik, gejala itu telah menghalangi

terciptanya demokrasi, (2) Hilangnya kebebasan partisipasi politik masyarakat, (3) Politisasi KORPRI telah menimbulkan distorsi fungsi KORPRI seperti terjadinya diskriminasi dalam pelayanan publik terhadap kelompok yang berbeda afiliasi politik, (4) Kooptasi kelembagaan untuk memperoleh suara (5) Mobilisasi politik untuk menggalang dukungan massa, (6) Kecemasan pribadi sebagian pegawai negeri ketika terpaksa dilibatkan di dalam kampanye.

Saran

Penulis mengharapkan masukan untuk menyempurnakan tulisan ini. Dari penelitian ada beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Perlu tumbuhnya kesadaran baru di kalangan pegawai negeri dan pejabat struktural maupun fungsional bahwa rakyat banyak yang diwakili di MPR / DPR (legislatif) lah yang berkuasa, sedangkan pemerintah dan birokrasi hanya merupakan pelaksana (eksekutif dan administrator). Birokrasi adalah pegawai negeri yang di gaji dan di biayai oleh pajak yang di pungut dari masyarakat. Konsekuensinya pembuat Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi presiden, Keputusan Menteri dan yang sejenisnya perlu dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan aspirasi masyarakat, dan konstitusi dasar.
2. Birokrasi perlu transparan dalam kegiatan – kegiatannya dan dalam membuat ketentuan – ketentuan teknis harus terbuka dan mengikutsertakan wakil – wakil atau kelompok kepentingan dalam masyarakat, dan tidak memihak suatu partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Pemerintah

- UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepegawaian
 UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 1971 tentang KORPRI
 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Partai Politik atau Golongan Karya

Majalah

- Tempo. 1978, *Jalur Kelapa, Untuk Mawas Diri*. Edisi 21 Oktober (15):52-54
 Topik. 1979, *Pencerminan Azas Demokrasi*. Edisi Juni (54):14-15
 Topik. 1981, *Harapan Para Cendekiawan*. Edisi Oktober (175):7-9
 Topik. 1981, *Penolakan P & K Dipertanyakan*. Edisi November (179): 49-50

Koran

³⁸ Jawa Pos, 30 Mei 1997. hal. IV yang berjudul “Pegawai Negeri Ikut Memilih”

- Jawa Pos, 6 Mei 1986
- Jawa Pos, 15 Mei 1986
- Jawa Pos, 11 Juni 1986
- Jawa Pos, 25 April 1987
- Jawa Pos, 2 Juni 1992
- Jawa Pos, 10 Juni 1992
- Jawa Pos, 12 Juni 1992
- Jawa Pos, 27 Mei 1997
- Jawa Pos, 28 Mei 1997
- Jawa Pos, 30 Mei 1997
- Jawa Pos, 31 Mei 1997
- Kompas, 6 November 1991
- Kompas, 26 September 1996
- Kompas, 10 April 2012
- Suara Karya, 9 Juni 1977
- Suara Karya, 6 April 1982
- Suara Karya, 14 April 1982
- Suara Karya, 29 April 1982
- Suara Karya, 30 April 1982
- Suara Karya, 14 Mei 1982
- Suara Karya, 25 Mei 1982
- Buku**
- Abdullah, Taufik., dkk .2013. *“Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 3 Berakhir dan Bermula”* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Afan Gaffar. 1999 . *“Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi”*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Ali Safa’at, Muchamad. 2011. *“ Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergaulan Republik “*. Jakarta : Rajawali Pers
- Badjuri, Abdulkahar, *“Dinamika Politik Nasional”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997)
- Bani, Saksono. 1995. *“Tiada Hari Tanpa Karya.”* Jakarta: Departemen Penbitmassmed DPP Golkar
- Bulkin, Farchan. 1985. *“Analisis Kekuatan Politik Di Indonesia, Pilihan Artikel Prisma”*, Jakarta: LP3ES
- Kansil dan Julianto. 1986. *“ Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia”*. Jakarta: Erlangga.
- Kasdi, Aminuddin. 2005. *”Memahami Sejarah”*, Surabaya: UNESA University Press
- Mashad , Dhurorudin. 1999. *“Korupsi Politik, Pemilu & Legitimasi Pasca Orde Baru”*. Jakarta : Pustaka Cidesindo
- Pabottingi, Mochtar.,dkk . 1995 *“Menelaah kembali format politik orde baru”*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Perdana, Ari A..dkk, . 2009. *“Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan”*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 2010. *“Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia”*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rozi, Syafuan . 2006. *“Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak: Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia”* . Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sabit, Arbi. 2005. *“Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suhatno. 2003. *“Infentarisasi Sumber Sejarah Masa Orde Baru Sampai Reformasi Tahun 1966-1988”*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata DIY.
- Suryadinata, Leo .1992. *“Golkar Dan Militer Studi Tentang Budaya Politik”*. Jakarta : LP3ES.
- Suwarno. 2012. *“ Sejarah Politik Indonesia Modern”* . Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Syuhadhak, Mokhamad 1996. *“ Administrasi Kepegawaian Negara Teori dan Praktek Penyelenggara.raannya di Indonesia”*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Thoha, Miftah. 2005. *“ Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia”*. Jakarta : Kencana.
- Widjanarko, Puspoyo . 2012. *“Pemilu Indonesia 1955-2009”*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- William, R . 1994. *“Pemilu - Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik”*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Zaini Abar, Ahmad. 1990. *“ Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru”*. Solo : Ramadhani
- Jurnal Online**
- Muhaimin,Yahya. 1980. *“Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”*. Jurnal Prisma No.10, Tahun IX, Edisi Oktober 1980
- Suwarno. 2008. *“ Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik”*. Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 69, Edisi September 2008
- Website dan Artikel**
- Pemilu – pemilu di Indonesia, tersedia di <http://kepastakaanpresiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=list&>